



Penerapan *Collaborative Governance* dalam Penguatan Pariwisata Lokal Berkelanjutan: Studi Kasus Festival Kampung Cempluk

Nisrina Khansa Anjani¹, Aisha Djody Shanata², Rahma Maylinda Putri³, Khairunisa Alifirli Altarik⁴, Edesius Rico Andana Salom⁵, Prisca Kiki Wulandari⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Email : nisrinakhansa@student.ub.ac.id

Article Info

Article history:

Received Oktober 02, 2025

Revised Oktober 17, 2025

Accepted Oktober 25, 2025

Keywords:

Collaborative Governance, Sustainable Tourism, Cultural Communities, Participation, Kampung Cempluk Festival

ABSTRACT

Sustainable local tourism requires collaborative involvement from various parties in every stage of planning, implementation, and evaluation. Kampung Cempluk, located in Malang Regency, is an example of local culture-based tourism development through the Kampung Cempluk Festival as an effort to revitalize community-based cultural spaces. This study aims to examine the application of collaborative governance in strengthening sustainable local tourism using the Kampung Cempluk Festival as a case study. Using a qualitative approach and case study method, data was collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation of stakeholders, including the local community, village government, artists, business actors, media, and academics. Based on the collaborative governance framework by Ansell and Gash, this study explores the dynamics of interaction among actors within the social, cultural, and institutional context of Kampung Cempluk. The findings are expected to contribute theoretically and practically to the development of inclusive and sustainable community-based tourism, as well as enrich understanding of the importance of collaborative governance for long-term tourism development in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Oktober 02, 2025

Revised Oktober 17, 2025

Accepted Oktober 25, 2025

Kata Kunci:

Collaborative Governance, Pariwisata Berkelanjutan, Komunitas Budaya, Partisipasi, Festival Kampung Cempluk

ABSTRAK

Pariwisata lokal yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan kolaboratif berbagai pihak dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kampung Cempluk, yang terletak di Kabupaten Malang, merupakan contoh pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal melalui Festival Kampung Cempluk sebagai upaya revitalisasi ruang budaya berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan collaborative governance dalam penguatan pariwisata lokal berkelanjutan dengan studi kasus Festival Kampung Cempluk. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, pemerintah desa, pelaku seni, pelaku usaha, media, dan akademisi. Berdasarkan kerangka collaborative governance dari Ansell dan Gash, penelitian ini mengeksplorasi dinamika interaksi antar aktor dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan Kampung Cempluk. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkaya pemahaman tentang pentingnya tata kelola kolaboratif untuk pembangunan pariwisata jangka panjang di Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nisrina Khansa Anjani

Universitas Brawijaya

E-mail: nisrinakhansa@student.ub.ac.id

PENDAHULUAN

Di Indonesia, potensi wisata desa semakin diakui sebagai sarana untuk memperkuat identitas regional, melestarikan warisan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif mereka dalam industri pariwisata. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada, desa-desa wisata dapat bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menjaga nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Salah satu contoh desa yang memiliki potensi besar dalam pariwisata berbasis budaya adalah Kampung Cempluk, yang terletak di Kabupaten Malang. Desa ini dikenal melalui Festival Kampung Cempluk, sebuah perayaan tahunan yang menampilkan berbagai kesenian tradisional, musik lokal, serta kuliner khas daerah. Festival ini bukan sekadar ajang hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas budaya mereka serta memperkuat rasa kebersamaan. Selain itu, keunikan Kampung Cempluk terletak pada filosofi keterangannya berasal dari sejarahnya sebagai desa yang dahulu hanya diterangi oleh lampu cempluk sebelum listrik menjangkau kawasan tersebut. Filosofi ini mencerminkan semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat dalam menjaga nilai-nilai local (Wahyudi & Adhitama, 2024).

Kampung Cempluk berada di Dusun Sumberjo RW.02 Desa Kalisongo Dau Malang, merupakan suatu Daerah yang sangat dekat sekali dengan Kota Malang melihat letak geografisnya. Sebagai embrio dari perkembangan kebudayaan daerah, kebutuhan akan ruang ekspresi dan apresiasi bagi komunitas-komunitas kesenian menjadi urgensi yang tak terelakkan. Oleh karena itu, dibentuklah suatu wadah kegiatan budaya yang dikenal dengan nama Kampung Cempluk Festival, sebagai media untuk menampung dan merayakan keberagaman praktik kesenian yang hidup di masyarakat. Festival ini diprakarsai oleh sejumlah tokoh masyarakat dan pegiat budaya, di antaranya adalah Priyo Sidhi, Redy Eko Prastyo, Sulaiman, dan Sukadi, serta mendapat dukungan dari Denny Mizar yang berasal dari Komunitas Pelangi Sastra Malang.

Inisiatif ini kemudian diterjemahkan oleh generasi muda Kampung Cempluk sebagai respons terhadap keterbatasan ruang fisik, dengan memanfaatkan media digital sebagai saluran baru ekspresi kultural. Salah satu bentuk konkret dari adaptasi ini adalah pengembangan laman daring www.kampungcempluk.org, yang tidak hanya menyajikan informasi mengenai kampung, tetapi juga berfungsi sebagai basis data dan dokumentasi dinamika kegiatan warga dalam format digital. Transformasi digital ini menjadikan ruang budaya Kampung Cempluk bersifat dinamis dan trans-lokal, mampu menjangkau di luar batas-batas geografis desa. Inisiatif tersebut juga mendorong terbangunnya jejaring kolaboratif antar kampung melalui Jaringan Kampung (Japung) Nusantara, sebuah ekosistem pertukaran kultural antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *collaborative governance* dapat memperkuat



pariwisata lokal di Kampung Cempluk. Dengan memanfaatkan partisipasi aktif berbagai pihak, studi ini berupaya merumuskan strategi yang sejalan dengan nilai budaya masyarakat sekaligus mengatasi kendala infrastruktur. Tujuan akhirnya adalah mentransformasi Kampung Cempluk menjadi destinasi wisata budaya yang berkembang, tetap menjaga warisan lokalnya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur merupakan landasan teoretis yang penting dalam sebuah penelitian. Bab ini menyajikan berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan guna memperkuat kerangka berpikir dan arah analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Melalui penelusuran literatur yang komprehensif, peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai posisi penelitian ini dalam konteks kajian yang lebih luas. Penelitian ini memiliki *research novelty* pada perbedaan fokus dari penerapan *collaborative governance* dengan studi kasus lapangan sebagai objek penelitian. Penerapan *collaborative governance* dalam penguatan pariwisata lokal berkelanjutan dilakukan pada Festival Kampung Cempluk. Penelitian menganalisis mekanisme tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) sebagai pendekatan strategis dalam penguatan pariwisata lokal yang berkelanjutan. Hal ini karena, beberapa penelitian terdahulu tidak memiliki fokus penelitian yang sama.

Sebagai contoh pada penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2023) menjelaskan peran modal sosial dalam menjaga keberlangsungan festival, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menelusuri bagaimana keterlibatan lintas aktor seperti pemerintah, komunitas lokal, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan. Sementara pada penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip *collaborative governance* dalam penguatan pariwisata lokal yang berkelanjutan di Kampung Cempluk. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji proses kolaboratif antar berbagai aktor pemerintah, masyarakat lokal, komunitas, dan sektor swasta yang dijalankan dalam perencanaan hingga implementasi sebagai bagian dari strategi pembangunan pariwisata yang tidak hanya bersifat partisipatif, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan jangka Panjang (Mahadiansar et al., 2023a)

Kemudian, salah satu aspek utama adalah fokusnya pada konteks pedesaan yang spesifik. Meskipun pendekatan Collaborative Governance telah banyak dikaji dalam berbagai konteks pariwisata, seperti wilayah pesisir di Banyuwangi dan Sumberkima, serta kawasan perkotaan seperti Surabaya (Mahadiansar et al., 2023b) penelitian ini menerapkan *collaborative governance* pada desa budaya tematik, seperti Kampung Cempluk, untuk mengatasi tantangan pariwisata pedesaan. Fokus utamanya adalah integrasi warisan budaya dalam pengelolaan pariwisata, dengan menekankan pelestarian dan promosi identitas budaya melalui kolaborasi pemangku kepentingan, yang mendukung pariwisata berkelanjutan dan inklusif.

Dalam penelitian sebelumnya, model pentahelix hadir sebagai kerangka teoretis yang menekankan kolaborasi antara lima elemen utama, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas (masyarakat), dan media. Pendekatan pentahelix efektif dalam menciptakan inovasi sosial dan mempercepat pembangunan berkelanjutan karena mampu mengakomodasi perspektif multistakeholder. Sementara itu, peran stakeholder dalam pengembangan kampung budaya, tidak hanya terbatas pada pemberi kebijakan atau sumber daya, tetapi juga sebagai fasilitator dan penggerak lokal yang menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya. Dalam



konteks Kampung Cempluk di Kabupaten Malang, kolaborasi antar-stakeholder menjadi kunci utama dalam membangun ruang ekspresi budaya yang partisipatif, inklusif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, studi ini menyoroti bagaimana dinamika kolaboratif dalam perspektif pentahelix dapat mendorong pengembangan kampung budaya secara berkelanjutan (E. P. Sari et al., 2021).

Pada penelitian selanjutnya, menurut Gina, Maesaroh dan Nina (2024) dalam judulnya “Collaborative dalam Pengembangan Wisata di Kabupaten Grobogan” menyoroti tantangan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata Bledug Kuwu. Kurangnya pemahaman Bersama tentang konsep kolaborasi dan dominasi orientasi profit menghambat keberlanjutan. Ditekankan pentingnya keselarasan peran antar pihak untuk mewujudkan kolaborasi yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan (Setyanintyas et al., n.d.). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maulia dan Setiyono (2023) penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance di Desa Wisata Nglanggeran berhasil diterapkan melalui lima progress utama yakni dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman Bersama, dan hasil sementara. Keberhasilan ini didukung oleh peran aktif berbagai pihak serta pemanfaatan digitalisasi untuk promosi dan pelayan wisata. Digitalisasi turut mendorong pertumbuhan ekonomi local dan kunjungan wisatawan. Penelitian selanjutnya akan mengeksplorasi sinergi antara kolaborasi dan teknologi digital dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam festival budaya di Kampung Cempluk (Maciej Serda et al., 2023).

Dalam penelitian lain yang dilakukan di Kota Pasuruan dalam artikelnya menyorot terkait kebudayaan setempat, khususnya yaitu tentang seni-seni yang ada di desa ini. Berbeda dengan artikel yang sering kita temui yang lebih membahas kepada aspek keagamaannya dan juga wisata religinya. Penulis menyatakan juga bahwa kesenian tradisional lama-kelamaan akan pudar. Sehingga penulis menekankan hal tersebut agar kesenian tradisional tidak pudar dan tetap dilestarikan, sehingga menjadi warisan budaya dan menjadi wisata kesenian. Selain itu juga wisata kesenian ini juga dapat menjadikan sumber perekonomian dari desa tersebut dan juga memiliki makna yang edukatif serta berorientasi kepada sejarah (Arsvendo & Khotimah, 2022).

Berdasarkan tinjauan literatur terdahulu, nantinya penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dalam konteks desa. Pendekatan *Collaborative Governance* telah muncul sebagai strategi efektif dalam mengatasi tantangan kompleks dalam pengembangan pariwisata (dos Anjos & Kennell, 2019). Dengan mendorong kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan seperti, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Model ini memastikan pengambilan keputusan yang inklusif serta tanggung jawab bersama. *Collaborative governance* telah terbukti berhasil diterapkan dalam berbagai konteks untuk meningkatkan keberlanjutan pariwisata melalui integrasi kepentingan pemangku kepentingan, optimalisasi pengelolaan sumber daya, serta mendorong inovasi (Bichler & Lösch, 2019).

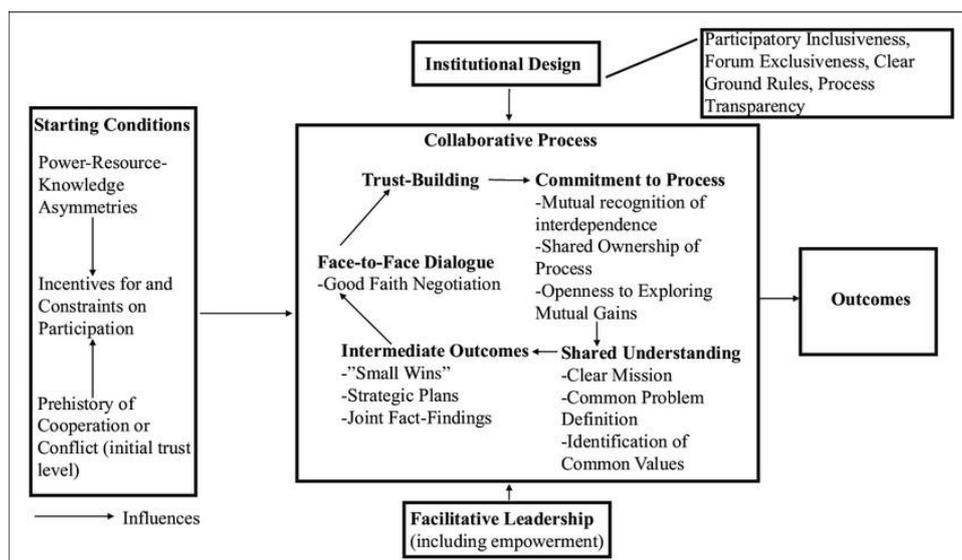
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) sebagai kerangka analisis utama. Model ini dipilih karena mampu memetakan dinamika hubungan antar pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan



pelaksanaan kebijakan atau program kolaboratif, khususnya dalam konteks penguatan pariwisata berbasis komunitas. Pendekatan ini relevan diterapkan dalam studi kasus Festival Kampung Cempluk, yang merupakan inisiatif budaya dari warga lokal di Desa Kalisongo, Kabupaten Malang, dalam membangun kampung budaya berbasis kolaborasi lintas sektor.

Model Collaborative Governance terdiri atas enam komponen utama: (1) Kondisi awal (*starting conditions*), yang mencakup tingkat kepercayaan antar aktor, distribusi kekuasaan, dan sejarah hubungan; (2) Desain institusional (*institutional design*), yaitu struktur formal dan aturan yang mengatur proses kolaborasi; (3) Kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), yang menjembatani kepentingan dan memperkuat dialog antar pihak; (4) Proses kolaboratif (*collaborative process*), termasuk komunikasi tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan pencapaian komitmen bersama; dan (5) Hasil akhir (*final outcomes*) (Ansell & Gash, 2007).



Gambar 1. Proses Tata kelola kolaboratif (Ansell & Gash)

Daftar Narasumber

No.	Nama	Jenis Kelamin	Peran
1.	Hartono, SAP., MM.	Pria	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
2.	Hanafi	Pria	Warga Lokal
3.	Siswanto	Pria	Kepala Desa Kalisongo
4.	Redy Eko Prasetyo	Pria	Akademisi, Inisiator, dan Penggiat Budaya
5.	Alzam Putra	Pria	Ketua Pelaksana Festival Kampung Cempluk
6.	Muhammad Riadus Sendita	Pria	Store Coordinator SPV



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal/*Starting Conditions*

Festival Kampung Cempluk berakar dari inisiatif warga Dusun Sumberejo, Desa Kalisongo, yang memiliki modal sosial tinggi dan semangat kolektif dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Kegiatan awal berupa “Sumberejo Tempo Dulu” kemudian berkembang menjadi festival budaya dengan identitas lokal yang kuat. Kepala Desa Kalisongo, Siswanto, menjelaskan,

“Awalnya peringatan Agustus itu warga membuat kegiatan Sumberejo tempo dulu, karena mirip seperti Malang tempo dulu, akhirnya dinamakan Kampung Cempluk.”

Meskipun dukungan kelembagaan dan anggaran dari pemerintah desa saat itu masih minim, partisipasi aktif warga dan keterlibatan seniman kampung seperti Handoko dan Alzam Putra menjadi fondasi penting pengembangan festival. Penyusunan *road map* komunitas oleh para pegiat budaya memperkuat arah gerak kolektif. Di tahun ketiga, dinamika internal sempat mengancam keberlangsungan festival akibat miskomunikasi antar tokoh pengurus, sebelum akhirnya generasi muda mengambil alih dan mentransformasi identitas “Kampung Cempluk” dari simbol marginal menjadi sumber kebanggaan lokal. Kolaborasi lintas sektor mulai terbangun, termasuk dengan aktor eksternal seperti komunitas Bolu Singosari yang mendukung pelestarian budaya dan ekonomi lokal. Modal sosial yang kuat, inklusivitas partisipasi warga, dan semangat musyawarah menjadi kunci keberlanjutan festival ini, meski tantangan seperti transparansi dan ketimpangan antar kelompok RW tetap perlu diatasi secara berkala.

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian tentang Festival Reog Ponorogo yang menyoroti berbagai tantangan internal dan eksternal, seperti perubahan nilai budaya, keterbatasan sumber daya, serta minimnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang justru menjadi hambatan utama dalam pelestarian festival. Dalam konteks Festival Reog, kurangnya partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan menyebabkan penyelenggaraan festival terancam secara kualitas, sementara nilai-nilai kebersamaan perlahan terkikis oleh arus globalisasi dan perubahan zaman (Imanto et al., 2024). Hal ini berbanding terbalik dengan Festival Kampung Cempluk, di mana partisipasi aktif warga, musyawarah, dan semangat kolektif menjadi kekuatan utama meskipun dukungan pemerintah masih terbatas. Selain itu, jika di Ponorogo perubahan teknologi dan regulasi pemerintah menjadi tantangan yang sulit diatasi tanpa strategi khusus, di Kampung Cempluk justru generasi muda berhasil mengambil alih kepemimpinan dan mentransformasi identitas festival menjadi sumber kebanggaan lokal, yang pada akhirnya mampu menjaga keberlanjutan kegiatan dan meredam dinamika internal.

Desain Institusi/*Institutional Design*

Festival Kampung Cempluk dikelola melalui struktur kelembagaan semi-formal yang tumbuh dari partisipasi masyarakat, tanpa didukung oleh regulasi formal seperti Perdes. Tata kelola festival bergantung pada mekanisme sosial, musyawarah, dan konsensus warga yang membentuk panitia secara sukarela dan organik. Kepala Desa Kalisongo, Siswanto, menyatakan,

“Belum ada aturan resmi, karena untuk tata kelolanya itu dari masyarakat atau kepanitiaan.”



Dukungan desa bersifat terbatas, terutama pada aspek teknis seperti perizinan dan anggaran kecil dari dana desa. Sementara itu, prosedur administratif disiasati melalui proposal kegiatan, SKLAD, dan SOP dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), yang menjadi prasyarat kolaborasi resmi. Struktur kepanitiaan bersifat representatif, melibatkan RT, RW, hingga tokoh adat, dengan sistem pembagian peran seperti pengelolaan stan oleh masing-masing RT dan pendistribusian informasi lewat grup digital komunitas. Kolaborasi eksternal, seperti dengan Bolu Singosari, mulai dibangun dalam dua tahun terakhir dan memperkuat jejaring pendukung festival. Meski bersifat inklusif dan adaptif, desain institusional ini masih lemah dari sisi legalitas dan keberlanjutan. Ketergantungan pada tokoh karismatik dan absennya aturan formal menimbulkan risiko jangka panjang. Oleh karena itu, ada peluang bagi pemerintah desa untuk memperkuat kerangka institusi yang telah ada melalui regulasi yang tetap mengedepankan inisiatif warga dan semangat gotong royong.

Festival Kampung Cempluk merepresentasikan model kepemimpinan fasilitatif berbasis komunitas, di mana pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif warga melalui mekanisme musyawarah, struktur kepanitiaan representatif, dan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan ini berhasil memperkuat rasa kepemilikan kolektif dan keberlanjutan festival, meskipun belum ditopang oleh regulasi formal seperti Perdes. Namun, studi Molla, Supriatna, dan Kurniawati (2021) serta teori Ansell dan Gash (2007) menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif memiliki tantangan tersendiri, seperti ketidakseimbangan kekuasaan antar aktor, ketergantungan pada tokoh karismatik, dan ketiadaan aturan dasar yang dapat menghambat keberlanjutan kolaborasi (Raharjo et al., n.d.). Sebaliknya, model kepemimpinan yang lebih terpusat dengan dukungan regulasi formal sering kali memberikan stabilitas dan kepastian hukum, meskipun berisiko mengurangi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan fasilitatif di Kampung Cempluk menunjukkan potensi besar dalam tata kelola inklusif dan berkelanjutan, namun perlu dilengkapi dengan penguatan kelembagaan agar mampu menjawab tantangan jangka panjang tanpa kehilangan semangat gotong royong dan inisiatif warga.

Kepemimpinan Fasilitatif/*Facilitative Leadership*

Kepemimpinan fasilitatif dalam Festival Kampung Cempluk tercermin dari peran pemerintah desa yang mendorong partisipasi warga secara aktif tanpa mengambil alih kendali. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan teknis, administratif, dan sebagian anggaran operasional festival. Kepala Desa menyatakan,

“Yang memimpin Kampung Cempluk itu warga atau masyarakatnya sendiri, dan kegiatannya rata-ratanya kegiatan gotong royong masyarakat.”

Pendekatan ini memperlihatkan kepercayaan terhadap kapasitas sosial masyarakat dalam mengelola kegiatan kolektif. Pelibatan masyarakat berlangsung melalui forum RT, RW, Karang Taruna, dan tokoh lokal, membentuk struktur kepemimpinan horizontal berbasis komunitas. Tokoh sentral seperti Alzam Putra menjalankan peran penghubung antargenerasi dan lintas sektor, serta mendorong partisipasi setara, khususnya generasi muda. Gaya kepemimpinan terbuka dan dialogis ditunjukkan melalui keterbukaan terhadap masukan, komunikasi dua arah, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sponsor seperti Bolu



Singosari dan lembaga pemerintah seperti Disparbud. Dinas Pariwisata turut memperkuat kepemimpinan fasilitatif dengan menyediakan pendampingan teknis dan dukungan promosi. Model kepemimpinan ini berhasil menjembatani kepentingan beragam pihak serta memperkuat rasa kepemilikan kolektif. Festival Kampung Cempluk menjadi contoh praktik kepemimpinan fasilitatif yang mengutamakan pemberdayaan warga, kolaborasi lintas sektor, dan keberlanjutan berbasis relasi sosial.

Penelitian di Festival Kampung Cempluk menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif tercermin dari peran pemerintah desa sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif warga tanpa mengambil alih kendali penuh. Pendekatan ini mengedepankan kolaborasi, komunikasi dua arah, dan pemberdayaan masyarakat melalui struktur kepemimpinan horizontal berbasis komunitas, yang berhasil memperkuat rasa kepemilikan kolektif dan keberlanjutan festival. Sebagai perbandingan, penelitian Elise Dwi Permatasari (2021) mengenai Festival Reyog Nasional di Kabupaten Ponorogo menyoroti bahwa meskipun terdapat prinsip kolaboratif governance, kepemimpinan festival lebih didominasi oleh pemerintah dan lembaga formal dengan peran sentral yang kuat, sehingga partisipasi masyarakat cenderung terbatas dan bergantung pada kebijakan pemerintah (Permatasari et al., 2021). Sementara itu, studi Darnita (2024) tentang Festival Budaya Isen Mulang di Kalimantan Tengah juga menunjukkan model kepemimpinan top-down dengan struktur birokratis yang terpusat, di mana pengambilan keputusan didominasi pemerintah provinsi dan dinas terkait. Meskipun pendekatan ini menjamin pelaksanaan yang terorganisir, ia kurang memberi ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dan inovasi berbasis komunitas (Devi Darnita Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya et al., 2024). Perbedaan ini menegaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif seperti yang diterapkan di Kampung Cempluk, yang menekankan pada kolaborasi dan pemberdayaan warga, lebih efektif dalam membangun partisipasi aktif dan keberlanjutan berbasis modal sosial, dibandingkan dengan kepemimpinan yang terlalu dominan dan birokratis.

Proses Kolaborasi/*Collaboration Process*

Proses kolaborasi dalam pengelolaan Festival Kampung Cempluk berlangsung secara informal namun konsisten, berbasis nilai kekeluargaan dan musyawarah. Pemerintah desa hanya terlibat dalam tahap perencanaan secara terbatas dan lebih banyak berperan sebagai pendukung teknis, sementara masyarakat dan panitia festival memimpin pelaksanaan secara mandiri. Meskipun belum dilembagakan secara formal dalam forum kolaboratif permanen, komunikasi dua arah tetap berjalan melalui diskusi bulanan, evaluasi harian selama pelaksanaan, serta forum musyawarah rutin yang memperkuat transparansi dan tanggung jawab kolektif. Salah satu warga menyatakan,

“Kalau memang festival ini penting buat semuanya yang ada di Kampung Cempluk... saya rasa semua akan menjaga, semua akan merawat.”

Mekanisme internal ini ditopang oleh komitmen kuat masyarakat dan dibangun secara iteratif melalui proses negosiasi informal dan penyusunan proposal. Relasi antara panitia dan instansi seperti Disparbud didasarkan pada prinsip mutualisme: komunitas memperoleh dukungan kelembagaan, sementara pemerintah daerah menemukan mitra aktif dalam pelestarian budaya. Komunikasi dilakukan secara langsung maupun virtual, disesuaikan dengan



karakteristik kelompok sasaran. Meski kerja sama lintas sektor masih terbatas pada aspek teknis seperti pembinaan organisasi, dampak dari proses kolaborasi ini mulai terasa, terutama pada peningkatan ekonomi lokal melalui festival. Komitmen terhadap regenerasi terlihat dari keterlibatan aktif generasi muda dalam berbagai lini teknis dan kreatif. Festival Kampung Cempluk tidak hanya memperkuat identitas dan solidaritas warga, tetapi juga berfungsi sebagai ruang pembelajaran kolektif lintas generasi dan institusi yang menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap warisan budaya.

Penelitian tentang Festival Kampung Cempluk menunjukkan bahwa proses kolaborasi berlangsung secara informal namun konsisten, berlandaskan nilai kekeluargaan dan musyawarah, di mana pemerintah desa hanya berperan pada tahap perencanaan dan dukungan teknis sementara masyarakat dan panitia memimpin pelaksanaan secara mandiri. Hubungan mutualisme dengan instansi seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga memperluas jejaring pendukung dan dampak ekonomi lokal. Namun, studi Putri et al. (2023) menyoroti bahwa ketergantungan pada mekanisme informal tanpa dukungan regulasi formal dapat mengancam keberlanjutan kelembagaan jangka panjang, sebab meskipun modal sosial penting, ketiadaan struktur formal membatasi akses terhadap sumber daya (Suryani, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan Erlinda (2019) yang menekankan bahwa festival dengan forum kolaboratif formal lebih mampu mengelola konflik dan menjaga kesinambungan kegiatan (E. Sari, 2019). Dengan demikian, Festival Kampung Cempluk menunjukkan bahwa kolaborasi informal mampu menciptakan partisipasi luas dan adaptasi sosial, tetapi tetap memerlukan penguatan kelembagaan formal agar keberlanjutan, akses sumber daya, dan tata kelola yang berkelanjutan dapat tercapai secara lebih stabil.

Hasil Akhir/*Final Outcomes*

Dalam model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash, *final outcomes* merujuk pada hasil kolektif yang tercapai melalui interaksi dan kerjasama antara berbagai aktor yang terlibat. Pada Festival Kampung Cempluk, hasil akhir yang diperoleh meliputi peningkatan kapasitas komunitas lokal untuk mengelola festival secara mandiri, dengan peran pemerintah desa yang lebih sebagai fasilitator dan pemberi dukungan teknis. Masyarakat lokal, bersama dengan aktor eksternal seperti Dinas Pariwisata dan sektor swasta, berkolaborasi dalam membangun jaringan yang mendukung pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi lokal melalui event tersebut. *Outcome* lainnya tercermin dalam penguatan hubungan sosial antar aktor, yang berujung pada terciptanya sebuah ekosistem yang berkelanjutan bagi pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Kolaborasi yang terjadi dalam Festival Kampung Cempluk tidak hanya menghasilkan sebuah event budaya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Dengan demikian, hasil akhir dari kolaborasi ini meliputi keberlanjutan festival sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal, serta transformasi hubungan sosial yang mendukung kolaborasi jangka panjang dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya.

Dalam model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash, *final outcomes* merujuk pada hasil kolektif dari interaksi dan kerjasama berbagai aktor, seperti yang terlihat pada Festival Kampung Cempluk yang berhasil meningkatkan kapasitas komunitas lokal dalam mengelola festival secara mandiri, dengan peran fasilitatif dari pemerintah desa serta dukungan dari Dinas Pariwisata dan sektor swasta yang memperkuat jejaring pelestarian budaya dan ekonomi lokal.



Kolaborasi ini membentuk ekosistem pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan dan mempererat nilai kebersamaan serta tanggung jawab kolektif. Temuan ini sejalan dengan pola kolaboratif di Festival Teluk Jailolo, di mana pemerintah, swasta, dan masyarakat saling melengkapi peran dalam pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata berkelanjutan (Habib 2018). Namun, tantangan muncul dalam studi Festival Reyog Nasional Ponorogo yang menunjukkan dominasi pemerintah menghambat partisipasi masyarakat dan pegiat budaya, sehingga mengurangi efektivitas hasil akhir (Permatasari et al., 2021). Perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan final outcomes dalam Collaborative Governance sangat dipengaruhi oleh keseimbangan peran aktor, keterlibatan aktif masyarakat, serta efektivitas komunikasi dan transparansi, sebagaimana berhasil diwujudkan dalam Festival Kampung Cempluk.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Festival Kampung Cempluk berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip *Collaborative Governance* meskipun dengan beberapa elemen yang berbeda atau bahkan dapat dianggap sebagai *outlier* dalam konteks model Ansell & Gash. Salah satu temuan utama adalah peran pemerintah desa yang lebih sebagai fasilitator dan bukan pengendali. Pemerintah desa memberikan dukungan teknis, anggaran terbatas, dan fasilitasi administratif tanpa mendominasi perencanaan dan pelaksanaan festival. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengelolaan kolaborasi, di mana peran pemerintah tidak selalu harus dominan untuk menciptakan hasil yang sukses. Selain itu, komunikasi dalam kolaborasi ini lebih bersifat informal dan kekeluargaan, sebuah dinamika yang tidak sepenuhnya sesuai dengan struktur komunikasi formal yang seringkali ditekankan dalam model Ansell & Gash. Musyawarah dan dialog terbuka menjadi cara utama dalam pengambilan keputusan, yang menciptakan kepercayaan dan kesepahaman di antara para pemangku kepentingan tanpa harus melalui prosedur yang kaku.

Keterlibatan komunitas lokal yang sangat tinggi dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan festival juga merupakan elemen yang mencolok. Masyarakat Kampung Cempluk tidak hanya terlibat dalam kegiatan teknis, tetapi juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan acara tersebut. Hal ini menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat yang autentik dan rasa kepemilikan kolektif dapat mendorong kesuksesan kolaborasi tanpa struktur yang formal. Terakhir, kolaborasi yang terjalin dengan institusi pendidikan tinggi, yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat seperti Alzam Putra, juga memberikan dimensi baru dalam *Collaborative Governance* yang lebih berfokus pada hubungan antara komunitas lokal dan akademisi. Ini membuka kemungkinan bagi kolaborasi lintas sektor yang lebih holistik dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Festival Kampung Cempluk dalam menjaga kelestarian budaya dan pengembangan pariwisata lokal bukan hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada fleksibilitas dalam peran, komunikasi yang terbuka, dan partisipasi aktif komunitas. Hal ini menantang model *Collaborative Governance* yang lebih tradisional dengan menunjukkan bahwa kolaborasi dapat berhasil meskipun dengan pendekatan yang lebih cair dan dinamis.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arsvendo, D., & Khotimah, K. (2022). Pengembangan Wisata Religi Sebagai Pariwisata Berkelanjutan Di Kota Pasuruan. *JUMPA*, 9(1).
- Bichler, B. F., & Lösch, M. (2019). Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights into a Community-Oriented Destination. *Sustainability 2019, Vol. 11, Page 6673, 11(23)*, 6673. <https://doi.org/10.3390/SU11236673>
- Devi Darnita Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, C., Tampung Penyang NoKM, J., Raya, J., Palangka Raya, K., & Tengah, K. (2024). Dampak Ekonomi, Pariwisata, dan Budaya Festival Isen Mulang di Kalimantan Tengah 2023. *JURNAL TATA KELOLA SENI*, 10(1), 44–57. <https://doi.org/10.24821/JTKS.V10I1.11252>
- Imanto, A., Suharto, B., Isnaini, S., & Agustina, T. S. (2024). Tantangan Festival Reog Ponorogo sebagai Budaya Leluhur Indonesia. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(2), 1329–1339.
<https://doi.org/10.31539/KAGANGA.V7I2.11016>
- Maciej Serda, Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg, L. V, ...
(2023).) *فاطمى ح*. Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 404–418. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Mahadiansar, M., Alfiandri, A., & Syuzairi, M. (2023a). *Analysis of Collaborative Governance in Tourism Based on Coastal Community Empowerment in Indonesia*. 5–10.
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-150-0_2
- Mahadiansar, M., Alfiandri, A., & Syuzairi, M. (2023b). *Analysis of Collaborative Governance in Tourism Based on Coastal Community Empowerment in Indonesia*. 5–10.
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-150-0_2
- Permatasari, E. D., Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA, & Aulia Puspaning Galih, S.IIP., MS. (2021). *Analisis Penyelenggaraan Program Festival Dalam Pelestarian Budaya Dengan Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Pada Festival Reyog Nasional Di Kabupaten Ponorogo)*.
- Raharjo, W. B., Cirebon, A. K., Jawa, P., Program, B., Administrasi, S., & Daerah, P. (n.d.). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Budaya Keraton Kacirebonan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat*.
- Sari, E. (2019). *Konstruksi sosial festival budaya di Kampung Cempluk, Kampung Celaket dan Kampung Dokar / Erlinda Sari*.
- Sari, E. P., I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S. A. M. A. Ph. D., & Erlita Cahyasari, S.AP.,M.AP. (2021). *Kolaborasi Stakeholder Dalam Mendorong Terwujudnya Pengembangan Kampung Budaya Dengan Perspektif Pentahelix (Studi Pada Kampung Cempluk Di Kabupaten Malang)*.
- Setyanintyas, G., Widowati, N., & Soedarto, J. P. (n.d.). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Di Kabupaten Grobogan*.



Suryani, L. (2023). Modal Sosial Dalam Pengelolaan Festival Budaya Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Festival Kampung Cempluk).

Jurnal Ilmiah Global Education, 4(2), 842–853. <https://doi.org/10.55681/JIGE.V4I2.881>

Volume, K., & Nomor, V. (2018). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Festival Teluk Jailolo Sebagai Wisata Budaya Di Kabupaten Halmahera Barat. *Ejournal KAWASA*, 8(4), 35–47.

<https://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/kawasa/article/view/462>

Wahyudi, S. I., & Adhitama, M. S. (2024). Penataan Kampung Cempluk Sebagai Kampung Wisata Budaya Di Kabupaten Malang. *Jurnal Mahasiswa Departemen Arsitektur*, 12(1).

<https://arsitektur.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jma/article/view/2400>